

# ANALISIS PROSPEK PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

RIANCE ENUMBI  
NPP. 31.1058

*Asdaf, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah*  
*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*  
email : \_enumbiriance@gmail.com\_\_\_\_\_

Pembimbing Skripsi : Prof.Dr.Drs.Ermaya Suradinata,SH,MH,MS

## ABSTRACT

**Background (GAP):** Central Papua, despite its abundant natural resources of economic and strategic value, is the poorest province in Indonesia. One of the main factors contributing to the high poverty rate in Central Papua is its fluctuating economic growth each year. The role of the local government is crucial in the formation and development of Village-Owned Enterprises (BUMKam). The local government is responsible for creating a conducive environment for the growth of BUMKam and providing the necessary support for village communities to manage BUMKam effectively. However, the local government's role in the formation of BUMKam still faces various challenges and obstacles. **Objective:** This study aims to identify the factors inhibiting the formation of BUMKam, analyze the efforts that have been made, and explore the prospects of the local government in the formation of BUMKam. **Method:** This research uses a qualitative method with ASOCA analysis. Data were collected through interviews and documentation from various primary and secondary sources. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the obstacles to the formation of BUMKam come from both internal and external factors, including the limited number of trained human resources, inadequate regulations, political instability or social conflict, lack of access and infrastructure, and lack of entrepreneurial awareness and interest. Although efforts such as socialization, coaching, and empowerment have been made, these efforts have not been effective. **Conclusion:** Better prospects are needed to overcome these obstacles, including increasing the capacity of human resources, improving regulations, ensuring political stability, enhancing infrastructure, and increasing entrepreneurial awareness.

**Keywords:** Central Papua, Poverty, BUMKam, Local Government

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Papua Tengah, meskipun memiliki banyak kekayaan alam yang bernilai ekonomis dan strategis, merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor utama tingginya

angka kemiskinan di Papua Tengah adalah pertumbuhan ekonominya yang fluktuatif setiap tahun. Peran pemerintah daerah sangat vital dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan BUMKam dan memberikan dukungan yang diperlukan masyarakat kampung untuk mengelola BUMKam secara efektif. Namun, peran pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pembentukan BUMKam, menganalisis upaya yang telah dilakukan, serta mengeksplorasi prospek pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ASOCA. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembentukan BUMKam berasal dari faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih, regulasi yang tidak memadai, ketidakstabilan politik atau konflik sosial, kurangnya akses dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran dan minat kewirausahaan. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan, upaya tersebut belum berjalan efektif. **Kesimpulan:** Diperlukan prospek yang lebih baik untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, stabilitas politik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran kewirausahaan.

**Kata Kunci:** Papua Tengah, Kemiskinan, BUMKam, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 menetapkan beberapa tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan umum dan taraf hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan umum dapat dicapai melalui upaya pengentasan kemiskinan, karena jika kemiskinan dapat dikurangi, maka kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Namun, ketimpangan ekonomi baik antar kelompok maupun antar wilayah, khususnya antara pedesaan dan perkotaan, masih menjadi tantangan besar. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pembangunan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian desa, sehingga meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Sadat & Prahmana, 2019).

Pembangunan pedesaan dilakukan untuk mewujudkan desa sebagai solusi perubahan sosial dan landasan perubahan, guna memperkuat basis perekonomian negara, mendorong pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Salah satu visi dan misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (periode 2014-2019) adalah "Membangun Indonesia dari Pinggiran," yang tercantum dalam agenda program kerja nawa cita. Program kerja ini membawa angin segar bagi pemerintah daerah untuk mencari keseimbangan dalam pembangunan desa dan kota serta menghilangkan diskriminasi pembangunan desa (Indra, 2021).



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendorong desa untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya sendiri dan menumbuhkan semangat memajukan masyarakat. Desa berperan dalam pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara, sehingga pemerintah sangat memperhatikan pembangunan desa. Desa merupakan unit terkecil suatu negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat dan sangat berkepentingan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Karena desa dipandang dekat dengan masyarakat, potensi dan kebutuhan masyarakat desa lebih mudah dipahami dan direspons (Saputra, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki 11.456 desa mandiri, 3.409 desa maju, 28.766 desa berkembang, 9.238 desa tertinggal, dan 4.854 desa sangat tertinggal. Dari tahun 2014 hingga 2022, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia terus meningkat, menunjukkan perkembangan positif yang memberikan semangat baru untuk pembangunan desa (Rahmawati & Yusuf, 2018).

Namun, laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menunjukkan bahwa pada tahun 2021–2023, Papua memiliki jumlah desa sangat tertinggal tertinggi di antara provinsi lainnya. Rata-rata indeks desa membangun (IDM) Papua sebesar 0,4563 adalah yang terendah di antara provinsi lain. Dari total 5.411 desa di Papua pada tahun 2021, 3.604 desa berstatus sangat tertinggal, 1.464 desa berstatus tertinggal, 316 desa berstatus berkembang, 26 desa berstatus maju, dan hanya satu desa berstatus mandiri (Lewy, 2022).

Menurut data BPS pada September 2023, Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, mencapai 26,80 persen, dengan Papua Barat di posisi kedua dengan 21,43 persen. Papua adalah provinsi termiskin, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,03%. Papua Barat berada di posisi kedua dengan 20,49%. Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di urutan ketiga dan keempat dengan persentase kemiskinan 19,96% dan 13,85% masing-masing (Ilham et al., 2020).

Papua Tengah, meskipun memiliki banyak kekayaan alam yang bernilai ekonomis dan strategis, berada di urutan pertama provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu alasan utama tingginya angka kemiskinan di Papua Tengah adalah pertumbuhan ekonominya yang fluktuatif setiap tahun. Kabupaten Puncak Jaya, yang sebelumnya bagian dari Provinsi Papua, kini termasuk dalam Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022. Kabupaten ini meliputi wilayah yang kaya akan hasil hutan, tambang, flora dan fauna, serta keindahan alam .

Namun, tingkat ekonomi Kabupaten Puncak Jaya masih rendah, sehingga pemerintah harus membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) untuk meningkatkan ekonomi setempat. BUMKam diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya alam mereka dengan lebih efektif, sehingga dapat mencegah kesenjangan ekonomi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa didirikan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pemerintah desa yang mandiri.

Peran pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengembangan BUMKam sangatlah vital. Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan BUMKam serta memberikan dukungan yang diperlukan masyarakat kampung untuk mengelola BUMKam secara efektif. Meskipun memiliki peran signifikan, peran pemerintah daerah dalam

pembentukan BUMKam masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, termasuk kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat BUMKam, keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang mengatur operasional BUMKam.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses ini, mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mengeksplorasi prospek dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan fungsi BUMKam sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di wilayah Papua Tengah.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah daerah dalam konteks ini, dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan BUMKam di tingkat lokal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tertarik untuk mengkaji “Analisis Prospek Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.”

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Meskipun telah banyak kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung pembangunan pedesaan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam implementasi dan hasilnya, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Papua Tengah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memberikan kerangka kerja untuk memberdayakan desa dan meningkatkan perekonomian lokal melalui pembentukan BUMKam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini belum sepenuhnya berhasil, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, yang tetap menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia.

Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa serta pemerintah daerah tentang konsep dan manfaat BUMKam. Banyak desa belum memiliki kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola BUMKam secara efektif. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan akses yang diperlukan untuk mendukung operasional BUMKam. Regulasi dan kebijakan yang ada seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMKam.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik dan konflik sosial juga menjadi penghambat signifikan. Papua Tengah sering menghadapi tantangan keamanan yang dapat mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga memperburuk situasi, menyebabkan banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana atau tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Penelitian ini mengambil kesenjangan ini sebagai fokus utama untuk memahami lebih dalam hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembentukan dan pengembangan BUMKam di Kabupaten



Puncak Jaya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan praktik terkait peran pemerintah daerah dalam konteks ini. Penelitian ini juga berusaha menawarkan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta meningkatkan efektivitas BUMKam sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Tengah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penjelasan mengenai sepuluh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan prospek pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK):

Analisis Good Corporate Governance BUMK Menuju Kinerja Usaha yang Sehat oleh Diana V. AB dan S. Efendi M. (2022). Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMK di Arul Latong, dengan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menghambat implementasi GCG yang optimal, sehingga mengurangi kinerja usaha (Diana et al., 2022).

Analisis Peluang BUMK oleh Lobwaer A. K. R. dan Awal M. (2020). Studi ini mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pendirian BUMK di Kabupaten Merauke. Ditemukan bahwa kemitraan dengan berbagai lembaga termasuk pemerintah dan perguruan tinggi sangat penting untuk pengembangan BUMK, meskipun terdapat risiko besar dalam manajemen keuangan dan sumber daya manusia (Lobwaer & Awal, 2020).

Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan BUMK oleh Rusli M. et al. (2022). Penelitian ini menyoroti masalah patologi birokrasi dalam BUMK di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, termasuk penyalahgunaan anggaran dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menghambat efektivitas operasional BUMK (Rusli et al., 2022).

Manajemen Kelembagaan BUMK oleh Linda D. F. et al. (2023). Studi ini menilai manajemen kelembagaan BUMK di Kampung Maredan Barat, Kabupaten Siak, dan menemukan bahwa manajemen yang baik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, serta monitoring dan evaluasi yang tepat, mendukung keberhasilan BUMK (Linda et al., 2023).

Sosialisasi Inovatif Pengelolaan BUMK oleh Sawir M. et al. (2023). Penelitian ini mengembangkan metode sosialisasi inovatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola BUMK di Kampung Dosay, Kabupaten Jayapura, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan BUMK (Sawir et al., 2023).

Pembentukan BUMK untuk Desa Mandiri oleh Syahrudin S. et al. (2023). Penelitian ini fokus pada pembentukan BUMK di Desa Zenegi sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi lokal dan mendorong kemandirian desa, dengan hasil bahwa pemahaman masyarakat mengenai BUMK dan pengelolaannya meningkat signifikan (Syahrudin et al., 2023).

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam BUMK oleh Koko Saputra (2021). Studi ini mengevaluasi efektivitas unit usaha simpan pinjam dalam memberdayakan masyarakat di Kampung Minas Barat, dan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama (Koko Saputra, 2021).

Peran BUMK dalam Mendukung Pembangunan Desa oleh Milla M. A. P. et al. (2023). Penelitian ini mengkaji peran BUMK di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan menemukan bahwa walaupun ada pengaruh positif, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk optimalisasi peran BUMK (Milla et al., 2023).

Peran BUMK Tenggekahwang dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat oleh Braweri I. M. S. dan Fitanto B. (2023). Penelitian ini menilai peran BUMK dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung Brongkendik, Kabupaten Fakfak, dan menemukan bahwa BUMK berperan penting dalam promosi dan pemasaran produk lokal (Braweri & Fitanto, 2023).

Potensi Pengembangan BUMK Sota oleh Lembang H. (2018). Studi ini menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan SWOT untuk mengevaluasi potensi pengembangan BUMK di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dan menemukan bahwa kekuatan utama terletak pada ketersediaan bahan baku lokal dan komitmen pemerintah desa, meskipun ada tantangan dalam aspek modal dan transportasi (Lembang, 2018).

Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga tentang berbagai aspek pembentukan dan pengelolaan BUMK, mulai dari penerapan tata kelola yang baik, peluang kemitraan, hingga tantangan dalam birokrasi dan manajemen sumber daya manusia. Hasil-hasil ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMK dalam pembangunan ekonomi desa.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan memberikan analisis mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di wilayah yang memiliki tantangan kompleks seperti Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada daerah dengan infrastruktur yang lebih berkembang, penelitian ini menyoroti dinamika unik di daerah terpencil dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi dalam konteks lokal, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menambah literatur yang ada dengan perspektif baru mengenai penerapan kebijakan pembangunan desa di daerah yang kurang terlayani.

Selain itu, penelitian ini menggabungkan metode analisis ASOCA (Analisis Situasi, Organisasi, dan Aktivitas) yang jarang digunakan dalam studi sebelumnya terkait BUMKam. Penggunaan metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengidentifikasi hambatan, tetapi juga mengusulkan solusi praktis yang berbasis pada analisis sistematis kondisi lapangan.



Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan BUMKam, tetapi juga menyediakan panduan implementatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi lokal untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi di desa-desa terpencil.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Hasil penelitian ini akan mencakup pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana prospek pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dan hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Dengan mengevaluasi hambatan dan upaya yang telah dilakukan, penelitian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pembentukan BUMKam di Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan konteks yang sama, sehingga dapat memperkaya literatur dan studi kasus dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai lembaga yang menaungi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, mendorong penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang dapat diterapkan. Maka, tujuan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Puncak Jaya. Identifikasi hambatan ini penting untuk memahami tantangan-tantangan yang menghambat implementasi kebijakan dan program BUMKam sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Puncak Jaya. Analisis terhadap upaya yang telah dilakukan akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang telah diambil dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembentukan BUMKam. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui prospek pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kampung yang ditinjau dengan metode ASOCA (Analisis SWOT dan Operasionalisasi Kelembagaan). Metode ini akan membantu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan pembentukan BUMKam di Kabupaten Puncak Jaya.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, digunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif yang memberikan fokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis berdasarkan Studi Kasus, yang memungkinkan eksplorasi dan observasi mendalam terhadap aktivitas, proses, dan kejadian terkait pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di

Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini juga mengacu pada metode penelitian yang telah terbukti efektif, memastikan bahwa pendekatan yang digunakan konsisten dengan standar ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti (Arikunto, n.d.).

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai aspek yang relevan dari objek penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Badan Usaha Milik Kampung di beberapa kampung terpilih di Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen dan laporan yang berkaitan dengan BUMKam dari tahun 2014 hingga 2022. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks dan perkembangan BUMKam dalam rentang waktu yang relevan (Adi Kusumastuti et al., 2020).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Wawancara. Observasi dilakukan terhadap prospek pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam di Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan wawancara dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Adapun instrumen penelitian yang digunakan meliputi Dokumen/Literatur dan Alat Rekam, yang digunakan untuk mendokumentasikan interaksi dengan pihak terkait dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Keseluruhan metodologi penelitian ini didukung oleh teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penyimpulan hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara tujuan penelitian dan metode yang diterapkan (Marinu Waruwu, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan lebih mendalam melalui proses interpretasi terhadap data non-numerik. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan kajian dokumen, kemudian disederhanakan dan ditransformasikan untuk memudahkan interpretasi. Proses analisis tersebut menitikberatkan pada penyebab, penjelasan, dan faktor-faktor yang terkait dengan topik penelitian, sehingga memungkinkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terhadap masalah yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Melalui BUMKam di Daerah Pedalaman**

##### **3.1 Tantangan Pembentukan BUMKam**

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan tantangan utama dalam pembentukan dan pengelolaan BUMKam di daerah pedalaman. Proses pembentukan BUMKam memerlukan keahlian manajerial dan pemahaman bisnis yang memadai, namun sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam



pengelolaan operasional dan strategi bisnis BUMKam secara efektif, sehingga menjadi kendala serius bagi keberhasilan badan usaha tersebut.

Infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang rendah menjadi hambatan lain dalam operasional BUMKam di daerah pedalaman. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak, kurangnya pasokan listrik, dan akses telekomunikasi yang terbatas seringkali menyulitkan distribusi produk dan akses pasar bagi BUMKam. Terutama di daerah pedalaman yang sulit dijangkau, kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas dapat menjadi penghalang serius bagi pertumbuhan dan keberlanjutan BUMKam.

Regulasi yang tidak memadai juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Kebijakan dan regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal dapat menghambat proses pembentukan BUMKam dan mempersulit operasionalnya. Kurangnya regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan tantangan khusus di daerah pedalaman dapat menghambat inisiatif masyarakat untuk membentuk dan mengelola BUMKam secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih baik agar mendukung pembentukan dan operasional BUMKam di daerah pedalaman.

### **3.2 Potensi dan Peluang**

Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu potensi besar di daerah pedalaman. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bisa menjadi solusi untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Melalui BUMKam, masyarakat setempat dapat terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan menguntungkan. Selain itu, BUMKam juga dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dirasakan oleh generasi masa depan.

Kreativitas dan inovasi lokal merupakan aset berharga yang sering terabaikan di daerah pedalaman. Masyarakat pedalaman seringkali memiliki kearifan lokal dan kreativitas yang belum tersalurkan dengan baik ke dalam ekonomi lokal. Pembentukan BUMKam bisa menjadi wadah untuk menggali potensi kreativitas dan kearifan lokal tersebut. Dengan memanfaatkan BUMKam sebagai platform untuk mengembangkan produk atau jasa berbasis lokal, masyarakat pedalaman dapat meningkatkan nilai tambah dari potensi yang dimiliki dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Penguatan kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Melalui BUMKam, masyarakat tidak hanya sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik dari proses ekonomi yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan memiliki BUMKam yang kuat dan berkelanjutan, masyarakat pedalaman dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi. Ini akan memberikan dorongan besar bagi kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah pedalaman secara keseluruhan.

### **3.3 Upaya Pemerintah dan Pihak Terkait**

Dalam mendorong pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di daerah pedalaman, dukungan dari regulasi dan kebijakan yang memadai sangatlah penting. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung secara khusus pembentukan dan operasional BUMKam di wilayah-wilayah ini. Regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan lokal akan memudahkan BUMKam dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat juga harus diperkuat. Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung, seperti insentif pajak atau bantuan modal, akan membantu BUMKam untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi lokal.

Selanjutnya, upaya pendampingan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota BUMKam merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan operasionalnya. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, baik dalam manajemen bisnis maupun pengelolaan keuangan, BUMKam akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Pendampingan yang intensif dan pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal akan membantu membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola badan usaha tersebut secara efektif. Ini juga akan memberikan dorongan moral kepada anggota BUMKam, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kesuksesan usaha mereka.

Selain dukungan regulasi dan peningkatan kapasitas manajerial, pengembangan infrastruktur dasar juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem BUMKam di daerah pedalaman. Pemerintah harus fokus pada pengembangan jaringan transportasi yang memadai dan penyediaan akses listrik yang merata. Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi distribusi produk BUMKam ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang investasi dan kemitraan yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan BUMKam. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur tidak hanya akan mendukung operasional BUMKam, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman secara keseluruhan.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam diskusi temuan utama penelitian, ditemukan bahwa masalah infrastruktur dan aksesibilitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak, pasokan listrik yang tidak stabil, dan akses telekomunikasi yang terbatas menyulitkan proses operasional BUMKam. Hal ini mempengaruhi distribusi produk serta akses pasar bagi BUMKam, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dasar di daerah pedalaman.

Selain itu, permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi fokus dalam diskusi temuan utama penelitian. Kurangnya pemahaman manajerial dan keahlian bisnis di antara anggota dan pengurus BUMKam memperumit pengelolaan badan usaha ini secara efektif. Diperlukan pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola BUMKam dengan baik.



Poin terakhir dalam diskusi temuan utama penelitian adalah tantangan terkait regulasi yang tidak memadai. Regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal daerah pedalaman seringkali menjadi hambatan utama dalam pembentukan dan operasional BUMKam. Oleh karena itu, penyesuaian regulasi yang lebih baik yang dapat mendukung kebutuhan dan tantangan spesifik di daerah pedalaman menjadi sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan BUMKam di tingkat lokal.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik**

Dalam diskusi temuan menarik, beberapa aspek penting muncul yang menjadi sorotan dalam penelitian pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Salah satunya adalah potensi besar yang dimiliki oleh sumber daya alam di daerah pedalaman yang belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan BUMKam dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk turut serta dalam manajemen sumber daya tersebut.

Selanjutnya, kekayaan kreativitas dan inovasi lokal juga menjadi aspek menarik dalam diskusi temuan penelitian. Masyarakat pedalaman seringkali memiliki kearifan lokal dan kreativitas yang belum tersalurkan dengan baik dalam pengembangan produk atau jasa. Pembentukan BUMKam diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali potensi ini dan mengembangkannya menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Terakhir, diskusi temuan menarik juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian ekonomi masyarakat pedalaman melalui pembentukan BUMKam. Dengan adanya BUMKam, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik dari proses ekonomi yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap pengembangan ekonomi daerah mereka sendiri.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, beberapa kesimpulan dapat ditarik yang menjadi refleksi atas tantangan dan peluang dalam pembentukan BUMKam di daerah pedalaman. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia terlatih menjadi salah satu hambatan utama, di mana rendahnya kemampuan manajerial dan keterampilan bisnis menghambat pengelolaan BUMKam secara efektif. Kedua, tingkat regulasi yang tidak memadai, khususnya terkait regulasi BUMKam, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pembentukan dan operasional BUMKam. Ketiga, ketidakstabilan politik atau konflik sosial menjadi faktor yang mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan minat masyarakat dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam BUMKam.

Selain itu, kurangnya akses dan infrastruktur menjadi hambatan lainnya, di mana infrastruktur yang tidak memadai menghambat operasional dan distribusi produk BUMKam. Terakhir, kurangnya

kesadaran dan minat kewirausahaan di masyarakat juga menjadi kendala, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan budaya kewirausahaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan keterampilan manajerial dan bisnis secara berkelanjutan. Kedua, dibutuhkan pengembangan regulasi khusus tentang BUMKam serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendukung BUMKam. Ketiga, pentingnya meningkatkan keamanan dan stabilitas lingkungan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di daerah pedalaman.

Selain itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran dan minat kewirausahaan melalui kampanye edukasi, program penghargaan, serta pendidikan dan pengembangan jiwa kewirausahaan sejak dini. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pembentukan dan operasional BUMKam di daerah pedalaman dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi lokal.

**Keterbatasan Penelitian.** Meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang hambatan dan peluang dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Puncak Jaya, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas responden dan peneliti. Kedua, cakupan geografis yang terbatas hanya pada Kabupaten Puncak Jaya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah-daerah lain di Papua Tengah atau wilayah Indonesia lainnya yang memiliki karakteristik berbeda. Ketiga, kendala logistik dan aksesibilitas di wilayah terpencil seperti Papua Tengah dapat mempengaruhi kelengkapan dan akurasi data yang diperoleh. Keempat, adanya ketidakstabilan politik dan konflik sosial di wilayah ini juga dapat membatasi kemampuan untuk melakukan penelitian lapangan secara mendalam dan berkelanjutan. Terakhir, meskipun penelitian ini berusaha menawarkan rekomendasi yang praktis, implementasi rekomendasi tersebut mungkin menghadapi tantangan yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau situasi keamanan yang memburuk. Keterbatasan-keterbatasan ini perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil penelitian dan dalam perumusan kebijakan yang berdasarkan temuan-temuan ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk arah masa depan penelitian terkait pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Puncak Jaya dan wilayah Papua Tengah lainnya, beberapa fokus dapat diidentifikasi. Pertama, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis terhadap implementasi kebijakan BUMKam dengan memperluas cakupan geografis ke daerah-daerah lain di Papua Tengah, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Kedua, studi longitudinal yang memantau perkembangan BUMKam dalam jangka waktu yang lebih panjang dapat memberikan wawasan tentang dinamika



perubahan dan keberlanjutan usaha ini, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa serta pemerintah daerah tentang pengelolaan BUMKam, termasuk melalui program pelatihan, pendampingan, dan kerjasama dengan institusi pendidikan atau LSM. Keempat, penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai model kemitraan antara BUMKam dengan sektor swasta, perbankan, dan pemerintah pusat serta daerah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain. Kelima, mengingat faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik dan konflik sosial yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan, penelitian di masa depan harus mempertimbangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif sosial, politik, dan ekonomi untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Terakhir, studi yang lebih mendalam mengenai dampak teknologi dan inovasi digital terhadap operasional BUMKam juga dapat menjadi arah penelitian yang relevan, mengingat potensi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar BUMKam. Dengan demikian, penelitian-penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat peran BUMKam sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, & Taofan Ali Achmadi. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif. Informasi Dan Statistik*.
- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.
- Braweri, I. M. S., & Fitanto, B. (2023). Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Tenggekahwang dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kampung Brongkendik, Kabupaten Fakfak. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(1).
- Diana, V., AB, S., & Efendi, M. (2022). Analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha Yang Sehat. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.120>

- Ilham, I., Muttaqin, Z., & Idris, U. (2020). PENGEMBANGAN BUMKAM BERBASIS POTENSI LOKAL DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.722>
- Indra, Y. (2021). TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG ( BUMKam ) MINEH MANDIRI DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK. *Universitas Islam Riau*.
- Koko Saputra. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Kampung Kampung Minas Barat. *Jurnal Niara*, 14(3). <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7389>
- Lembang, H. (2018). POTENSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG SOTA, DISTRIK SOTA, KABUPATEN MERAUKE. *Musamus Journal of Economics Development*, 1(1). <https://doi.org/10.35724/feb.v1i1.1230>
- Lewy, E. (2022). 1-50. In *Zur Betonung des Erdzja-Mordwinischen von Orkino*. <https://doi.org/10.1515/9783112564288-002>
- Linda, D. F., Wilson, W., Jais, M., & Ijayani, I. (2023). Manajemen Kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 11(1). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v11i1.121480>
- Lobwaer, A. K. R., & Awal, M. (2020). Analisis peluang badan usaha milik kampung (bumkam). *Forum Ekonomi*, 22(2).
- Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Milla, M. A. P., Taryono, T., & Desweni, S. P. (2023). Peran Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.225>
- Rahmawati, R., & Yusuf, M. (2018). ANALISIS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ROTI GULACIR DI DESA SUKABARES KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v9i2.4758>
- Rusli, M., Fakhurraji, A., & Ashwad, H. (2022). PATOLOGI BIROKRASI PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.118>
- Sadat, A., & Prahmana, L. (2019). Implementasi Program Badan Usaha Milik Kampung ( Bum Kampung ) Di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmu Komunikasi (Communique)*, 1(2).
- Saputra, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Kampung Kampung Minas Barat. *Jurnal Niara*.
- Sawir, M., Wulandari S, L., Qomarrullah, R., Fatimah, S., Kala'Padang, Y., Kamaluddin, S., Susilawaty, S., Abubakar, F., Pongtuluran, R., & Anirwan, A. (2023). SOSIALISASI INOVATIF PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DOSAY DISTRIK



SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v3i2.453>

Syahrudin, S., Jalal, N., Nahumury, M. A. I., Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3). <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i3.328>

